

## Sosialisasi Generasi Z Dalam Partisipasi Pemilu 2024

Franciscus Xaverius Wartoyo<sup>1</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan and [franciscus.wartoyo@uph.edu](mailto:franciscus.wartoyo@uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan and [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

---

### ABSTRAK

---

Generasi Z memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang signifikan dalam Pemilu 2024. Dengan karakteristik dan keterampilan unik yang dimiliki, generasi Z dapat membawa dampak besar dalam proses politik dan masyarakat. Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan hukum atau norma-norma yang berlaku untuk mengevaluasi atau menganalisis suatu konsep atau hubungan hukum. Dengan potensi-potensi ini, partisipasi aktif Generasi Z dalam Pemilu 2024 dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam politik dan masyarakat. generasi milenial memiliki kontribusi suara tertinggi dalam Pemilu, menunjukkan bahwa keputusan politik dan arah masa depan Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh preferensi dan partisipasi politik generasi ini. Dengan potensi-potensi ini, partisipasi aktif generasi Z dalam Pemilu 2024 dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam politik dan masyarakat. Penting bagi para pemimpin politik dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa suara generasi Z didengar dan diwakili dengan baik, sehingga kebijakan publik dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin politik dan lembaga-lembaga terkait untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan Generasi Z dalam proses politik dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diwakili dengan baik.

*Kata Kunci: Generasi Z, Partisipasi, Pemilu 2024*

### ABSTRACT

---

Generation Z has great potential to play a significant role in the 2024 elections. With their unique characteristics and skills, generation Z can have a big impact on the political process and society. Research that uses normative juridical research methods is research that examines legal regulations or applicable norms to evaluate or analyze a concept or legal relationship. With this potential, Generation Z's active participation in the 2024 elections can be a force that drives positive change in politics and society. The millennial generation has the highest vote contribution in elections, indicating that political decisions and the future direction of Indonesia are significantly influenced by this generation's political preferences and participation. With this potential, Generation Z's active participation in the 2024 elections can be a force that drives positive change in politics and society. It is important for political leaders and related institutions to ensure that the voices of Generation Z are heard and well represented, so that public policies can reflect their needs and aspirations. Therefore, it is important for political leaders and related institutions to pay attention to the aspirations and needs of Generation Z in political process and ensuring that their voices are heard and well represented.

*Keywords: Generation Z, Participation, 2024 Election*

---

### PENDAHULUAN

Kontestasi Pemilu 2024 semakin memanas. Ketiga calon presiden dan wakil presiden yang terdaftar resmi sudah mulai gencar berkampanye. Menariknya, kedua kandidat memiliki pendukung yang luas dan negara demokrasi sangat terdorong untuk memantau kemajuan pemilu kali ini. Generasi Z yang merupakan pemilih pemula dipandang sebagai kelompok dominan di daerah pemilihan. Karenanya, kesiapan generasi Z patut dipertanyakan. Pemeliharaan demokrasi menjadi semakin tidak stabil karena kepentingan ekonomi dan politik pemerintah. Indikator perkembangan Indonesia menjadi negara maju adalah meningkatnya pendapatan nasional

(Creswell & Clark, 2011). Sayangnya, tujuan pemerintahan ini adalah membiarkan politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi yang menciptakan oligarki. Belum lagi persoalan korupsi sistemik yang semakin mendarah daging dalam sistem. Sejauh ini, pemberantasan korupsi belum mampu menurunkan tingkat korupsi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia tengah diramaikan dengan masa kampanye pemilu 2024 yang telah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang akan dimulai pada 11 hingga 13 Februari 2024. Dan pemungutan serta perhitungan suara akan dilaksanakan pada 14 dan 15 Februari 2024. Selanjutnya rekapitulasi hasil perhitungan suara akan digelar pada 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024.

Setiap menjelang tahun politik, generasi muda selalu menjadi rebutan para politikus. Para calon presiden atau wakil presiden akan berusaha mendapatkan perhatian dan menyesuaikan dengan karakteristik generasi tersebut. Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024 sebesar 204.807.222 jiwa. Dari jumlah kurang lebih 55 hingga 60 persen diantaranya merupakan pemilih muda atau sekitar 106.358.447 jiwa. Fakta menarik dalam Pemilu kali ini datang dari data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) yang menunjukkan penentu masa depan Indonesia bergantung dari pilihan generasi milenial sebagai kontributor suara tertinggi, sebanyak 33% (Gunawan, 2022). Data Lemhannas RI menunjukkan demografi pemilih terbagi menjadi lima tipe generasi dengan kontribusi persentase jumlahnya dengan pendefinisian setiap generasi berdasarkan situs Indonesia baik milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Generasi milenial yang lahir pada periode (1981-1996) menjadi pemegang suara sebanyak 33%. Generasi X kelahiran (1965-1980) akan menjadi pemilih dengan jumlah suara terbesar kedua sebanyak 28%.

Generasi Z, atau milenial, memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pemilihan, mengingat proporsi suara yang signifikan yang mereka miliki. Dengan 23% suara, generasi Z menjadi salah satu kelompok pemilih terbesar dalam pemilu. Karena itu, tidak mengherankan jika para calon presiden, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, akan berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari generasi Z. Kelompok muda ini sering menjadi target kampanye politik, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam penentuan arah politik dan keputusan pemilihan (Mariska & Kusmanto, 2020). Para calon presiden akan berupaya untuk menarik perhatian generasi Z dengan menyampaikan pesan-pesan yang relevan dan menarik bagi mereka, seperti isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, lingkungan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kampanye mereka mungkin juga mengandalkan media sosial dan platform digital lainnya, yang sering menjadi sarana komunikasi utama bagi generasi Z. Tetapi penting untuk dicatat bahwa untuk memenangkan dukungan generasi Z, para calon presiden juga harus memperhatikan kredibilitas, integritas, dan visi mereka untuk masa depan Indonesia. Generasi Z cenderung lebih kritis terhadap politisi yang dianggap tidak konsisten atau tidak jujur, dan mereka mencari pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka dengan tulus (Aji, 2021). Dengan demikian, kemampuan para calon presiden untuk menggaet dukungan generasi Z tidak hanya tergantung pada upaya mereka untuk menjangkau kelompok ini, tetapi juga pada kesesuaian nilai-nilai dan agenda politik mereka dengan aspirasi dan kebutuhan generasi muda saat ini.

## LANDASAN TEORI

### A. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi yang sehat. Ini adalah proses di mana warga negara secara aktif terlibat dalam kegiatan politik, baik itu melalui pemilihan umum, demonstrasi, kampanye politik, diskusi publik, atau keterlibatan dalam organisasi politik dan masyarakat sipil. Partisipasi politik mencerminkan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan merupakan fondasi dari sistem demokratis. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Modernisasi politik merujuk pada perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mengarah pada pembentukan institusi-institusi politik modern dan meningkatnya kesadaran politik di antara warga negara (Abhan dkk., 2019). Dalam konteks ini, partisipasi politik bertindak sebagai indikator kemajuan politik suatu negara dalam mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan memberikan warga negara kesempatan untuk berperan dalam proses politik. Dengan partisipasi politik yang luas dan inklusif, suatu negara dapat memastikan representasi yang lebih baik dari berbagai kepentingan masyarakat dan membangun legitimasi politik yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang aktif dan melindungi hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu atau pribadi-pribadi dengan tujuan mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah disebut sebagai partisipasi politik (Mewoh dkk., 2015). Ini bisa melibatkan berbagai aktivitas, seperti:

1. Mengikuti Pemilihan Umum: Memilih calon yang dianggap mewakili kepentingan mereka dalam pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik yang paling umum.
2. Kampanye Politik: Mengikuti kampanye politik, baik sebagai relawan atau mendukung calon tertentu dengan cara menyebarkan informasi atau melakukan aktivitas lain untuk mempromosikan calon tersebut.
3. Demonstrasi dan Protes: Mengikuti demonstrasi atau protes untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau mendesak perubahan atas kebijakan pemerintah.
4. Lobbying: Membentuk kelompok kepentingan atau bergabung dengan organisasi politik atau masyarakat sipil untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dengan cara memberikan informasi, argumentasi, atau tekanan langsung.
5. Mengajukan Petisi: Mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menarik perhatian terhadap isu tertentu dan meminta tindakan atau perubahan kebijakan.
6. Menulis Surat atau Artikel: Menulis surat kepada pejabat pemerintah, surat kabar, atau artikel di media sosial untuk menyuarakan pendapat atau mengkritik kebijakan tertentu.
7. Diskusi Publik: Berpartisipasi dalam diskusi atau forum publik untuk membahas isu-isu politik dan memberikan masukan atau solusi.
8. Menggunakan Hak-hak Hukum: Menggunakan sistem peradilan untuk melawan kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau konstitusi.

Partisipasi politik dari individu-individu ini penting dalam memastikan bahwa suara dan aspirasi warga negara didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan oleh

pemerintah. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi.

Partisipasi politik memang mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan. Ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau berkontribusi pada pembuatan keputusan politik (Badan Pengawas Pemilu RI, 2019). Beberapa bentuk partisipasi politik yang umum meliputi:

1. Memilih dalam Pemilihan Umum: Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling mendasar adalah dengan memilih dalam pemilihan umum untuk memilih perwakilan atau pejabat publik.
2. Kampanye Politik: Ini melibatkan kegiatan seperti mendukung calon tertentu, menyebarkan informasi tentang kandidat atau isu-isu politik tertentu, atau melakukan kegiatan lain untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
3. Demonstrasi dan Protes: Partisipasi politik juga bisa terjadi melalui demonstrasi, protes, atau aksi massa untuk mengekspresikan pendapat atau ketidakpuasan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah.
4. Lobbying: Ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dengan cara memberikan informasi, memberikan tekanan politik, atau memobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu.
5. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Ini termasuk memberikan masukan atau saran kepada pembuat kebijakan melalui forum publik, konsultasi, atau partisipasi dalam kelompok kerja atau komisi.
6. Mengorganisir atau Bergabung dengan Organisasi Politik atau Masyarakat Sipil: Ini melibatkan menjadi anggota atau aktivis dalam organisasi politik, kelompok advokasi, atau LSM yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan atau praktik pemerintah.
7. Menggunakan Media Sosial: Partisipasi politik juga dapat terjadi melalui media sosial, seperti dengan menyebarkan informasi, menyuarakan pendapat, atau memobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu.

Partisipasi politik adalah inti dari demokrasi yang sehat dan memberikan warga negara cara untuk memengaruhi arah dan keputusan pemerintah. Dengan terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan, individu atau kelompok dapat memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan masyarakat dan negara yang lebih baik.

## **B. Teori Pemilihan Rasional**

Teori rasionalitas memiliki dasar yang jelas dalam gagasannya bahwa tindakan seseorang diarahkan secara jelas pada tujuan tertentu, dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan yang mereka miliki. Teori rasionalitas menyatakan bahwa individu secara logis memilih tindakan yang dianggap paling rasional atau optimal dalam mencapai tujuan-tujuan mereka, berdasarkan pertimbangan tentang nilai-nilai, preferensi, dan informasi yang mereka miliki pada saat itu. Dalam konteks politik, teori rasionalitas digunakan untuk memahami perilaku politik individu dan kelompok dalam memilih calon, mendukung kebijakan tertentu, atau terlibat dalam proses politik lainnya (Awaluddin, 2019). Menurut teori rasionalitas, individu akan memilih tindakan politik yang paling sesuai dengan kepentingan atau preferensi mereka, dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan yang tersedia. Dalam menerapkan teori rasionalitas dalam analisis politik,

penting untuk memahami bahwa preferensi dan nilai-nilai individu bisa beragam, dan keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan keputusan yang optimal secara objektif. Selain itu, individu mungkin terbatas oleh keterbatasan informasi atau pemahaman mereka tentang isu-isu politik tertentu, yang dapat memengaruhi keputusan yang mereka ambil. Meskipun demikian, konsep dasar dari teori rasionalitas tetap relevan dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku politik, karena memberikan kerangka kerja yang logis untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan rasional dan tujuan yang ditetapkan.

Pilihan rasional dalam konteks politik dapat dipandang sebagai kegiatan memilih yang merupakan hasil dari kalkulasi untung rugi. Ini berarti individu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya dan manfaat dari masing-masing pilihan yang tersedia, serta probabilitas atau kemungkinan bahwa suara atau tindakan mereka akan mempengaruhi hasil yang diharapkan (Delmana dkk., 2020). Ketika seseorang membuat keputusan politik, mereka tidak hanya mempertimbangkan "biaya" memilih, seperti waktu dan upaya yang diperlukan untuk memberikan suara atau terlibat dalam kegiatan politik, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dari tindakan tersebut. Manfaat ini dapat berupa dampak yang diharapkan dari kemenangan calon yang didukung atau keberhasilan kebijakan tertentu yang didukung. Selain itu, individu juga mempertimbangkan perbedaan alternatif yang tersedia, yaitu pilihan-pilihan yang ada di antara calon atau kebijakan yang berbeda. Dalam melakukan kalkulasi untung rugi, individu membandingkan berbagai pilihan yang ada dan memilih yang dianggap paling sesuai dengan preferensi atau kepentingan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan politik tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional yang sempurna. Faktor-faktor emosional, sosial, budaya, dan psikologis juga dapat memengaruhi keputusan politik seseorang. Selain itu, keputusan politik seringkali dibuat dalam kondisi informasi yang terbatas atau tidak pasti, yang dapat mempengaruhi ketepatan kalkulasi untung rugi. Meskipun demikian, konsep pilihan rasional tetap menjadi landasan penting dalam analisis perilaku politik, karena membantu kita memahami bagaimana individu membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan atas biaya, manfaat, dan perbedaan alternatif yang ada.

Teori rasionalitas dapat dihubungkan dengan pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah (Pilbup), termasuk dalam konteks tidak berpartisipasi atau golongan putih (golput). Pemilih pemula, seperti halnya pemilih pada umumnya, memiliki tujuan tertentu dalam proses pemilihan. Dalam kerangka teori rasionalitas, keputusan untuk tidak berpartisipasi atau golput juga dapat dipandang sebagai hasil dari kalkulasi untung-rugi yang rasional (Giddens, 2010). Individu mungkin mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka, seperti:

1. Persepsi terhadap Kandidat atau Partai: Jika pemilih pemula merasa tidak puas dengan kandidat atau partai yang tersedia, mereka mungkin memutuskan untuk tidak memberikan dukungan kepada siapapun.
2. Ketidakpedulian atau Rasa Putus Asa: Beberapa pemilih pemula mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perubahan signifikan atau bahwa proses politik tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.
3. Kesibukan atau Keterbatasan Waktu: Individu mungkin tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mempelajari kandidat atau isu-isu politik, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi.

4. Protes atau Ketidakpuasan terhadap Proses Politik: Golput juga bisa menjadi bentuk protes atau ekspresi ketidakpuasan terhadap sistem politik atau proses pemilihan yang dianggap tidak adil atau tidak efektif.

Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam Pilbup bisa dipandang sebagai tindakan rasional yang didasarkan pada pertimbangan atas manfaat dan biaya dari setiap pilihan yang tersedia. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa golput juga dapat memiliki konsekuensi politik, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi merupakan tanggung jawab yang penting bagi setiap warga negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan hukum atau norma-norma yang berlaku untuk mengevaluasi atau menganalisis suatu konsep atau hubungan hukum. Dalam konteks implementasi kebiru kimia di Indonesia, penelitian tersebut menggunakan pendekatan masalah untuk memeriksa konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan hukum yang mengatur masalah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan memeriksa berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kebiru kimia di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya. Tujuan dari penelitian ini mungkin termasuk untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kebiru kimia, menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebiru kimia, dan mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan implementasi kebiru kimia di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif biasanya melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah hukum yang akan diteliti, pengumpulan data hukum yang relevan, analisis terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut, dan penyusunan kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan temuan dari analisis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mungkin melibatkan perbandingan dengan praktik hukum di negara lain atau evaluasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami kerangka hukum yang mengatur kebiru kimia di Indonesia, mengidentifikasi tantangan atau kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut, dan mengusulkan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di negara ini, pemilihan umum, atau pemilu, bukan hal yang baru. Ini bukan awal atau akhir demokrasi; namun, ini berfungsi sebagai jembatan antara demokrasi dan penentuan pilihan hati nurani rakyat. Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi telah menjadikan pemilu sebagai agenda rutin. Namun, ada saat-saat ketika praktik politik negara yang bersangkutan tidak sesuai dengan prinsip demokratis. Problem politik dan pergantian pemimpin telah menjadi sangat dekat dengan pemilu. Pemilu adalah bagian penting dari proses mengumpulkan kehendak masyarakat dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu adalah lembaga demokrasi dan cara rakyat menjalankan kedaulatan. Pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis secara teoritis. Oleh karena itu, pemilu berfungsi sebagai penggerak sistem politik di Indonesia (Jurdi, 2019). Sampai saat ini, pemilu masih dianggap sebagai peristiwa penting bagi negara. Ini karena pemilu secara langsung melibatkan semua orang. Selain itu, rakyat dapat mengekspresikan keinginan mereka terhadap sistem kenegaraan atau politik melalui pemilu. Untuk memenangkan pemilu, seseorang harus mendapatkan perolehan suara terbanyak dari pemilih sesuai dengan prosedur pemilu. Suara penentu kemenangan tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan generasi.

Generasi Z menjadi salah satu kelompok pemilih Pemilu 2024 tersebut, yakni generasi Z atau i-generation. Generasi Z atau kerap yang sering disebut sebagai gen Z merupakan aset pemilu dengan populasi penduduk yang besar serta suara penentu kemenangan dengan komposisi suara tertinggi dalam Pemilu 2024. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, tentunya peranan dari generasi Z tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan boleh dikatakan bahwa generasi Z akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan suara para kontestan Pemilu 2024 nanti. Salah satu alasannya ialah karena jumlah dari generasi Z sangat banyak, bisa sampai 40 persen dari jumlah penduduk negara Indonesia. Dalam hal partisipasi politik, generasi Z sangat substansial karena dalam persentase jumlah pemilih generasi milenial banyak menyumbangkan suara di Pemilu 2024 nantinya (Pangestu, 2022). Generasi Z memiliki pengaruh tersendiri dalam pemilu selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi Z juga hidup pada era informasi di mana segala sesuatunya menggunakan internet atau media online. Gen Z sendiri satu kelompok terpisah dari generasi milenial atau generasi Y, dimana generasi Z lahir dalam rentang tahun 1996 – 2009. Kelompok ini termasuk generasi yang sangat muda dan *up to date* terhadap informasi yang tersebar di media massa dan internet. Generasi ini mempunyai karakter menyukai teknologi digital, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran pada perbedaan. Tetapi di lain sisi mereka juga memiliki kebiasaan kurang baik, seperti lebih senang dengan budaya instan dan kurang peka terhadap esensi privat. Karakteristik tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai pandangan dan tujuan hidup termasuk sikap dan cara pandang yang mempengaruhi peran mereka di pemilu 2024. Dengan jumlah yang relatif besar tersebut para tokoh politik berupaya maksimal untuk membangun opini publik yang bersifat humanis dan persuasif di tengah-tengah generasi Z (Rosnawati, 2022). Karena Gen Z di nilai sebagai kelompok yang mampu memberikan kontribusi besar bagi setiap kandidat. Dariacamata politik saat ini, partisipasi generasi Z sangat mencuri perhatian setiap kandidat politik. Karena intensifikasi terhadap akses informasi dari pemanfaatan teknologi digital (media sosial) membuka ruang untuk mengakses beragam isu secara luas dan cepat.

Memang benar bahwa generasi Z, yang merupakan pemilih pemula, dianggap sebagai kelompok dominan di beberapa daerah pemilihan. Namun, kesiapan generasi Z dalam menghadapi pemilu patut dipertanyakan, terutama mengingat perubahan dinamika politik dan sosial serta tantangan yang dihadapi dalam memelihara demokrasi. Penting untuk diakui bahwa pemeliharaan demokrasi tidak selalu stabil, terutama jika ada kepentingan ekonomi dan politik pemerintah yang mempengaruhi proses politik. Kepentingan tersebut bisa mengarah pada praktik-praktik yang tidak demokratis seperti penggunaan kekuasaan untuk keuntungan politik atau ekonomi pribadi, pelanggaran hak asasi manusia, atau pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Dalam situasi seperti ini, generasi Z perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan pentingnya partisipasi politik yang aktif. Mereka juga perlu mampu mengidentifikasi dan menanggapi tindakan-tindakan yang merusak demokrasi serta memilih pemimpin yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, generasi Z juga dapat berperan dalam memelihara demokrasi dengan melakukan advokasi, berpartisipasi dalam gerakan-gerakan sosial, dan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu politik dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas (Wulandari & Iriani, 2021). Dengan kesiapan, kesadaran, dan partisipasi aktif generasi Z, mereka memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam memperkuat dan memelihara demokrasi di Indonesia, bahkan di tengah tantangan yang ada.

Di sisi lain, meskipun mereka mayoritas terdidik dan akrab dengan teknologi, sulit untuk menarik suara mereka. Karena generasi Z banyak yang bersikap ambigu atau tidak peduli dengan masalah politik baru-baru ini. Media digital seperti, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok dan media sosial lainnya adalah aplikasi yang memiliki hubungan erat dengan generasi Z (digital native). Bisa di lihat penggunaan teknologi oleh gen Z, yaitu, sekitar 8,5 jam setiap harinya. Dengan demikian informasi seperti pesan politik seperti kampanye online yang di lakukan oleh para tokoh politik sangat relevan di kelompok ini. Pemilihan adalah inti dari demokrasi yang memungkinkan

rakyat memiliki kedaulatan, dan Generasi Z memiliki peran penting dalam mewujudkannya dengan berpartisipasi secara politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah.

Partisipasi dalam pemilihan pemimpin yang mencakup memilih figur yang mampu membawa perubahan, merakyat, dan bebas dari korupsi, serta meninjau *track record* dan prestasi kandidat, merupakan tindakan yang sangat penting bagi generasi Z. Dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria tersebut, generasi Z dapat memainkan peran aktif dalam membentuk masa depan negara mereka (Susanto, 2017). Keterampilan digital yang baik dari generasi Z memungkinkan mereka untuk:

1. Mencari Informasi dengan Cepat: Generasi Z dapat dengan mudah mencari informasi politik menggunakan mesin pencari atau platform media sosial, dan mereka memiliki kemampuan untuk menilai keaslian dan keakuratan informasi yang mereka temui.
2. Berpartisipasi dalam Diskusi Online: Mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik di media sosial, baik dengan teman sebaya maupun dengan individu-individu yang memiliki pandangan politik yang berbeda.
3. Menggunakan Teknologi untuk Mengorganisir dan Berbagi Informasi: Generasi Z dapat menggunakan teknologi untuk mengorganisir kampanye politik, menggalang dukungan, dan berbagi informasi tentang isu-isu politik yang mereka anggap penting.
4. Mengikuti Berita dan Acara Politik: Mereka dapat mengikuti berita politik dan acara politik melalui platform streaming dan situs web berita, yang memungkinkan mereka untuk tetap terinformasi tentang perkembangan terkini dalam politik.

Pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan dan merakyat adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat, termasuk generasi Z. Pemimpin yang terhubung dengan rakyatnya memiliki kemungkinan lebih besar untuk memahami masalah yang dihadapi oleh berbagai kelompok usia, termasuk generasi Z, dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, memilih pemimpin yang bebas dari korupsi merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dalam pemerintahan dan membangun kepercayaan publik. Generasi Z cenderung lebih kritis terhadap korupsi dan menginginkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meninjau *track record* dan prestasi kandidat adalah cara yang baik untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam memimpin. Melihat bagaimana mereka telah mengatasi tantangan sebelumnya dan mencapai tujuan mereka dapat memberikan gambaran tentang kemampuan mereka untuk menghadapi masalah yang kompleks dan mencapai perubahan yang diinginkan (Sembiring, 2014). Dengan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dengan cara ini, generasi Z dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi negara mereka. Pemilu 2024 memang menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia, dengan potensi melibatkan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah. Seiring dengan waktu yang semakin dekat, tahapan-tahapan dan gerakan politik mulai muncul di masyarakat.

Berbagai pihak, termasuk partai politik, calon kandidat, dan kelompok masyarakat sipil, mulai aktif dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi proses pemilihan yang akan datang. Pada tahap ini, publik dapat melihat berbagai gerakan politik dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh para calon kandidat untuk memperoleh dukungan dan memenangkan pemilihan. Ini mungkin termasuk kampanye politik, pembentukan aliansi, dan strategi komunikasi untuk mencapai pemilih potensial (Rohmah, 2019). Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024:

1. Akses Teknologi: Generasi Z telah tumbuh dengan akses mudah ke teknologi dan media sosial. Mereka dapat menggunakan platform-platform ini untuk mendapatkan



- informasi politik, berdiskusi dengan sesama pemilih, dan memobilisasi dukungan untuk calon atau isu-isu tertentu.
2. Keterlibatan Aktif di Media Sosial: Generasi Z cenderung terlibat secara aktif di media sosial, yang dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan memotivasi sesama generasi Z untuk menggunakan hak suara mereka.
  3. Kesadaran akan Isu-isu Penting: Generasi Z sering kali peduli dengan isu-isu seperti lingkungan, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kesehatan mental. Calon-calon yang mampu mengartikulasikan komitmen mereka terhadap isu-isu ini mungkin dapat menarik minat dan dukungan dari Generasi Z.
  4. Pendidikan Politik: Penting bagi generasi Z untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik agar mereka memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan konsekuensi dari keputusan politik. Pendidikan politik dapat membantu mereka menjadi pemilih yang lebih cerdas dan terinformasi.
  5. Keterlibatan dalam Gerakan Sosial dan Aktivisme: Generasi Z sering terlibat dalam gerakan sosial dan aktivisme di luar proses politik formal. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kesadaran mereka akan isu-isu politik dan mendorong partisipasi dalam pemilihan.

Penting bagi masyarakat, termasuk generasi Z, untuk mengikuti perkembangan politik dan menjadi terinformasi tentang platform, visi, dan rencana aksi dari masing-masing calon kandidat. Dengan pemahaman yang baik tentang pilihan mereka, pemilih dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat pemerintahan. Selain itu, partisipasi aktif dalam proses pemilihan, termasuk mendaftar sebagai pemilih dan memberikan suara pada hari pemilihan, adalah cara yang paling efektif bagi warga negara untuk mempengaruhi arah masa depan negara mereka. Pemilu adalah kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat mereka dan berkontribusi dalam menentukan arah politik dan pembangunan negara. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilihan dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, generasi Z dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari data tersebut menunjukkan, bahwa sikap politik generasi Z sudah seharusnya lebih intens dan tidak apatis dalam menilai politik. Sebagai suara penentu suatu keniscayaan bagi generasi Z untuk proaktif dalam mengevaluasi kondisi demokrasi politik yang akan menjadi sorotan publik.

Pemilu 2024 memang menjadi kontestasi yang semakin memanas dengan gencarnya kampanye dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (Retnaningsih, 2019). Dengan adanya pendukung yang luas bagi masing-masing kandidat, pemilihan kali ini menjadi sangat penting bagi masa depan negara. Generasi Z, yang merupakan pemilih pemula, memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan ini, terutama karena mereka dianggap sebagai kelompok dominan di daerah pemilihan. Namun, kesiapan generasi Z patut dipertanyakan mengingat kepentingan dan dampak besar dari pemilu ini terhadap masa depan negara. Pentingnya kesiapan generasi Z dalam pemilu ini termasuk pemahaman tentang platform dan visi dari masing-masing pasangan calon, serta kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Generasi Z perlu dilengkapi dengan informasi yang akurat dan mendalam tentang isu-isu politik dan sosial yang relevan untuk dapat membuat keputusan yang cerdas saat memberikan suara. Pendidikan politik dan keterlibatan dalam diskusi-diskusi publik dapat membantu generasi Z memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses pemilihan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam menentukan arah masa depan negara.

Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi Z untuk pemilihan ini dengan menyediakan pendidikan politik yang berkualitas, ruang untuk berdiskusi, dan akses kepada informasi yang objektif dan terpercaya. Dengan kesiapan yang baik dan partisipasi yang aktif dari generasi Z, pemilu 2024 memiliki potensi untuk menjadi momentum penting dalam mengukuhkan demokrasi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dengan poin;

1. Peran Penting Generasi Milenial: Data menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki kontribusi suara tertinggi dalam Pemilu, menunjukkan bahwa keputusan politik dan arah masa depan Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh preferensi dan partisipasi politik generasi ini.
2. Potensi Perubahan Politik: Dengan jumlah suara yang besar, generasi milenial memiliki potensi untuk mengubah arah politik dan kebijakan negara. Karena itu, kebijakan dan platform politik yang ditawarkan oleh calon-calon yang bersaing mungkin akan lebih memperhatikan isu-isu yang relevan bagi generasi milenial.
3. Fokus pada Isu-isu Generasi Milenial: Fakta ini menunjukkan bahwa calon-calon dan partai politik perlu memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian utama generasi milenial, seperti lapangan kerja, pendidikan, lingkungan, dan teknologi. Menanggapi isu-isu ini dengan serius dapat membantu para calon memenangkan dukungan generasi milenial.
4. Pentingnya Kampanye yang Efektif di Media Sosial: Generasi milenial cenderung menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik utama mereka. Oleh karena itu, kampanye politik yang efektif harus memanfaatkan platform media sosial untuk mencapai dan berinteraksi dengan generasi milenial secara langsung.
5. Pengaruh Terhadap Kebijakan Masa Depan: Dengan jumlah suara yang signifikan, generasi milenial dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan pemerintah dan arah masa depan Indonesia. Keterlibatan aktif mereka dalam proses politik dapat membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, fakta ini menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan generasi milenial dalam proses politik, serta mengakui peran mereka sebagai kontributor suara tertinggi dalam menentukan masa depan Indonesia.

Agar pemilu yang di dilaksanakan benar-benar membawa perubahan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Gen Z dengan kesadaran kolektif memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menentukan pilihan politik yang tepat tanpa di pengaruhi oleh propaganda dan retorika politik demi kepentingan pribadi. Akses informasi politik yang luas menjadi sarana untuk mencerna pilihan yang baik untuk menjaga marwah demokrasi sehat. Memahami setiap opini dari jejaring media sosial dan membuka ruang diskusi digital yang harmonis. Karena mau tidak mau dan suka tidak suka generasi Z akan menjadi bagian dari demokrasi politik bangsa ini secara berturut-turut. Memang benar, tidak salah rasanya jika nantinya suara generasi Z akan jadi ladang rebutan bagi setiap peserta pemilu. Namun, dibalik itu semua, setidaknya pemahaman generasi Z dalam hal dunia politik hendaknya juga semakin diasah agar nantinya mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh kandidat untuk memiliki suara yang dimiliki oleh generasi Z. Sangat disayangkan sekali apabila generasi Z dengan jumlahnya yang sangat banyak hanya dimanfaatkan saja tanpa mereka mengetahui untuk apa mereka harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024. Untuk itu, mengingat tahun 2024 akan segera di hampiri, bahkan alur pelaksanaan pemilu sudah bisa dimulai dari tahun sekarang, penting rasanya untuk

menekankan kembali kepada generasi Z agar menambah wawasan tentang dunia politik khususnya pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Karena jika generasi Z paham dengan hal yang berkaitan dengan kepemiluan, tentu akan menjadi catatan baik sendiri bagi pelaksanaan pemilu 2024.

Sepakat sekali, semoga pelaksanaan pemilu 2024 menjadi titik balik dalam meningkatkan marwah pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Keterlibatan aktif generasi Z dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kepentingan mereka diwakili dengan baik. Generasi Z memang merupakan harapan bagi masa depan negara Indonesia. Mereka memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dengan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Penting bagi generasi Z untuk memahami peran, fungsi, dan arti penting keberadaan mereka dalam pemilu 2024. Sebagai pemilih pemula, generasi Z memiliki kesempatan besar untuk membentuk arah masa depan negara mereka melalui hak suara mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang isu-isu politik dan sosial yang relevan, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara, generasi Z dapat membuat keputusan yang bijaksana dan memilih pemimpin yang mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain itu, partisipasi aktif dalam kampanye politik, diskusi-diskusi publik, dan mendukung inisiatif-inisiatif yang mempromosikan demokrasi dan keterlibatan masyarakat juga merupakan cara bagi generasi Z untuk berperan dalam proses pemilu 2024. Semoga generasi Z terus terinspirasi untuk menjadi agen perubahan positif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan mereka dalam pemilu dan proses demokrasi lainnya.

## KESIMPULAN

Generasi Z cenderung mendapatkan informasi politik secara insidental melalui media sosial. Ini karena media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi generasi Z, dan mereka sering terpapar kepada konten politik saat menggunakan platform-platform tersebut. Meskipun pola pencarian informasi mereka bersifat insidental, generasi Z memiliki keterampilan digital yang baik, yang memungkinkan mereka untuk mengakses, menilai, dan berbagi informasi dengan cepat dan efisien. Generasi Z memiliki keterampilan digital yang baik, penting untuk diingat bahwa kemampuan teknologi mereka tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik dan kemampuan kritis dalam menilai informasi tetaplah penting bagi generasi Z untuk menjadi pemilih yang cerdas dan terinformasi. Generasi Z diharapkan memainkan peran penting dalam partisipasi Pemilu 2024, terutama mengingat proporsi suara yang signifikan yang mereka miliki. Sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi dan media sosial, Generasi Z memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pemilihan dan memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan arah politik negara. Generasi Z memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang signifikan dalam Pemilu 2024. Dengan keterampilan teknologi yang baik, kesadaran akan isu-isu penting, dan motivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik, mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menentukan arah masa depan negara.

## REFERENSI

- Abhan, Manik, E. N. G., Fahriza, Telaumbanua, H. B., Budhiati, I., Anggraini, N. E., Sardini, N. H., Salam, R., Ananingsih, S. W., Yulianto, & Marzuki, W. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Aji, S. P. (2021). Dari KPU Orang Partai sampai "KPU Karir": Studi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Pasca Orde Baru (1999-2014). *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia 2*, 160–187.

- Awaluddin. (2019). Malpraktik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 104–120.
- Badan Pengawas Pemilu RI. (2019). *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Creswell, J. W., & Clark, P. V. L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (2 ed.). Sage.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20.
- Giddens, A. (2010). *Teori Struktural: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, I. (2022). *Focus Group Discussion Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak 2024*. T. E. UGM, Pewawancara.
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Call For Paper Pemilu Serentak 2019*.
- Mariska, R., & Kusmanto, H. (2020). Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(2), 36–43.
- Mewoh, A. R., Idroos, B. E., Habi, N. F., Madjowa, V., & Viryan. (2015). Pemilihan Kepala Daerah di Perbatasan Indonesia-Filipina (Perspektif Penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013). In *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*. Perludem.
- Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44.
- Retnaningsih, H. (2019). Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 157–172.
- Rohmah, N. S. (2019). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (AD HOC). *Electoral Research*, 6.
- Rosnawati, R. (2022). Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 45–54.
- Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Penerbit Nuansa Aulia.
- Susanto, A. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 9–19.
- Wulandari, I., & Iriani, F. (2021). Pengaruh Kolaborasi dengan Implementasi Teori U dan Iklim Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik BKN Pusat. *Civil Service Journal*, 15(2 November), 79–87.